

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan dan manual hidup bagi umat Islam, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Kitab suci ini memuat kisah-kisah teladan, kebijaksanaan ilahi, serta prinsip-prinsip pengaturan kehidupan yang mencakup aspek keimanan, hubungan sosial, ketuhanan, ritual peribadatan, hingga tata kelola pemerintahan. Ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW menawarkan sistem nilai komprehensif, dirancang untuk mengarahkan umat manusia meraih kesejahteraan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung meniscayakan terbentuknya komunitas. Guna mencegah disintegrasi sosial, keberadaan pemimpin yang memiliki kapasitas mengayomi dan mengatur menjadi keniscayaan untuk menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan stabil.¹

Kehadiran negara sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan berbagai tujuan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Negara harus dibangun oleh individu-individu yang memiliki keahlian di berbagai bidang, seperti agama, politik, sosial, pendidikan, dan lainnya. Negara dapat mengalami kehancuran jika kepemimpinan jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Banyak ahli telah mengemukakan berbagai konsep dan pandangan tentang negara.

¹ Dudung Abdullah, "konsep manusia dalam Al-Qur'an", *Al-Daulah: Jurnal UIN Alauddi* 6, no. 2, 2017.

Negara merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia. Sebagai analogi, ketika seseorang membangun keluarga, tempat tinggal menjadi hal yang sangat krusial karena berfungsi sebagai tempat berlindung dan bertahan hidup. Salah satu bentuk tempat tinggal tersebut adalah negara.² Negara atau pemerintahan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mencapai sebanyak mungkin tujuan yang telah disepakati bersama secara kolektif.³

Konsep negara memang menjadi topik yang menarik. Keragaman praktik, ide, dan pemikiran tentang negara tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal, seperti batasan waktu, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, negara-negara seperti Pakistan, Sudan, Iran, Mesir, Maroko, dan Aljazair bahkan telah mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Dalam konteks bentuk dan konsep negara, muncul perdebatan mengenai apakah Islam sebagai agama memiliki dasar-dasar *nash* (teks suci) dan legitimasi historis yang kuat untuk membentuk sistem pemerintahan. Al-Qur'an dan sunnah Nabi, sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak secara eksplisit memberikan petunjuk tentang siapa yang akan menggantikan Nabi atau sistem pemerintahan seperti apa yang harus dibentuk. Oleh karena itu, sepanjang sejarah umat Islam mulai dari zaman Nabi hingga era modern berbagai sistem dan bentuk pemerintahan telah muncul, mulai dari kekhalifahan,

² Akbar Dwianto, "Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhillah) Al-Farabi Dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia", *Disertasi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). 68.

³ Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (Al Madinah Al Fadhillah) Menurut AlFarabi", *Al-Lubb: Jurnal Pemikiran Islam* 2.2, (2017), 207.

demokratis hingga monarki absolut.⁴ Sejarah perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin atau khalifah tidak didasarkan pada standar yang kaku atau baku. Hal ini karena Islam lebih menekankan prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan etika dan tatanan bernegara. Setiap negara pasti memiliki tujuan tertentu, dan arah serta visi negara tersebut menjadi hal yang sangat penting. Tujuan inilah yang menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan negara, serta mengatur kehidupan rakyatnya agar selaras dengan tujuan tersebut. Tujuan negara dapat dianggap sebagai visi negara, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya.⁵ Meskipun Al-Qur'an sebagai literatur utama Islam tidak secara spesifik membahas konsep negara dalam satu ayat tertentu, sehingga melahirkan berbagai varian pemikiran tentang konsep negara, elemen-elemen penting yang menjadi dasar pembentukan negara dapat ditemukan di dalamnya. Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Dalam konteks ini, mempelajari pemikiran Yudian Wahyudi, salah satu tokoh akademisi Indonesia, tentang konsep negara dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an dari Nama ke Pancasila*, memberikan wawasan yang aktual dan inovatif dalam memperkuat pilihan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Yudian Wahyudi merupakan dosen pertama dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berhasil menembus *Harvard*

⁴ Afridawati, "Konsep Islam Tentang Negara", *Jurnal islamika* 14, no. 1, 2014.

⁵ Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung: Refika Aditama, hlm. 51

Law School di Amerika Serikat. Selain aktif sebagai dosen dan akademisi, Yudian juga menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Keberanian dan pemikirannya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya yang beragam. Pondok Pesantren Tremas memegang peran penting dalam sejarah hidup Yudian Wahyudi, hal ini terlihat dari beberapa bukunya yang menggunakan nama Tremas sebagai judul. Pengalaman intelektualnya yang panjang dimulai dari Tremas, membentuk pandangan dan pemikirannya yang mendalam. Selain itu, keberanian Yudian dalam menyuarakan pemikirannya juga dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia, khususnya gerakan negara khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan ini bahkan menjadi objek penelitian dalam bukunya tersebut, di mana ia menawarkan perspektif yang mendalam tentang relevansi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks keislaman dan kebangsaan.⁶ Kontekstualisasi penafsiran Yudian Wahyudi sangat relevan dan dibutuhkan dalam situasi dan kondisi bangsa saat ini. Sebagaimana kita rasakan bersama, belakangan ini ada dari beberapa kelompok yang terus berupaya mengganggu bangunan kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, padahal sudah disepabati oleh para pendiri bangsa dari berbagai komponen. Kelompok itu terus berusaha membenturkan antara agama dan negara. Oleh karena itu, kiranya perlu upaya menggali dan menjelaskan kembali nilai dan ajaran Al-Quran yang berbicara tentang ajaran dan prinsip kebangsaan, kemudian dikontekstualisasikan dengan kenyataan kebangsaan

⁶ Yudian Wahyudi, “*Membumikan Al-Qur’an dari Nama ke Pancasila*” Yogyakarta: Cakrawala, 2022.

Dalam konteks Indonesia, pendirian Negara Khilafah seperti yang digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat diartikan sebagai bentuk pemberontakan terhadap Negara Pancasila. Jika Negara Khilafah berhasil didirikan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibubarkan dan digantikan oleh negara baru. Padahal, Negara Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Siapapun, termasuk umat Islam, yang lahir dan hidup di Indonesia terikat dengan perjanjian kenegaraan ini. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan, "Penuhilah janji-janji (yang telah kalian buat)," QS. Al-Maidah: 1, sementara mengingkari janji termasuk ciri kemunafikan. Bahkan, Al-Qur'an menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah," QS. An-Nisa: 145. Karena penentuan bentuk negara merupakan masalah *ijtihadiah* (hasil pemikiran manusia) dan bukan kewajiban agama, umat Islam Indonesia tidak terikat dengan konsep Negara Khilafah yang diusung oleh HTI. Dengan demikian, Negara Pancasila, yang ternyata sangat selaras dengan semangat Piagam Madinah, justru mendapatkan penguatan. Oleh karena itu, Indonesia tidak memerlukan sistem pemerintahan berbasis Khilafah, tetapi lebih membutuhkan banyak pemimpin (*khalifah*) di berbagai bidang yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa negara Pancasila tidak membutuhkan atau bahkan haram menerima negara khilafah. Kalau menerima khilafah, itu artinya akan membunuh negara Pancasila itu sendiri. Pancasila tidak akan ada apa-apanya bagi bangsa Indonesia jika tanpa ada upaya lahir dan batin untuk memperjuangkannya. Begitupula, bangsa Indonesia bisa saja pada saatnya tidak merasakan apa pentingnya dengan Pancasila jika hanya sakti dalam pengucapan,

tetapi minim dalam aktualisasi. Untuk meneruskan proyek besar mengisi negara Pancasila inilah urgensi kehadiran pemikiran Yudian Wahyudi.⁷

Di tengah meningkatnya gerakan radikalisasi di Indonesia, Pancasila kembali menjadi perhatian utama sebagai alat utama pemersatu bangsa yang seharusnya mampu menjaga keutuhan NKRI dari ancaman ekstremisme. Sebagai titik temu ideologis antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, Pancasila dipandang sebagai solusi strategis untuk melawan polarisasi paham liberalisme dan radikalisme. Masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya upaya terencana, menyeluruh, dan terorganisir yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk membentuk masyarakat bermoral dan berkualitas. Perlawanan terhadap radikalisme harus dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, mengingat kedudukannya yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Secara konstitusional, Pancasila menempati posisi sebagai sumber utama segala hukum sekaligus pilar fundamental negara yang telah disepakati sebagai falsafah hidup bangsa. Hal ini menegaskan bahwa seluruh persoalan kebangsaan wajib diselesaikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjadikannya kompas etis dalam menghadapi segala tantangan ideologis di Indonesia.⁸

Hermeneutika, sebagai ilmu yang mempelajari proses interpretasi teks, berperan penting sebagai alat untuk menganalisis konsep negara dalam penafsiran Yudian Wahyudi secara komprehensif dan sesuai

⁷ Yudian Wahyudi, *Membumikan Al-Qur'an dari Nama ke Pancasila*, hlm.79.

⁸ Hairul Fauzi dan Fathul Anwar, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Perspektif Al-Qur'an Sebagai Upaya Deradikalisasi Dalam Menjaga Keutuhan NKRI". *At-Ta'lim Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2, 2021.

konteks. Hans-Georg Gadamer, tokoh kunci dalam bidang ini, menyoroti peran sentral dialog dan interaksi antara penafsir dengan teks. Menurutnya, pemahaman merupakan hasil interaksi antara *horizon* (perspektif) penafsir dan *horizon* teks itu sendiri. Gadamer menegaskan bahwa latar belakang historis dan kultural penafsir tidak dapat dipisahkan dari proses interpretasi, sebab setiap interpretasi lahir dari dialog dinamis yang berkelanjutan antara penafsir dan teks. Dalam hal ini konteks penafsiran Al-Qur'an, mengindikasikan bahwa konsep negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial, politik, dan budaya pada saat penafsiran dilakukan. Proses ini melibatkan interaksi timbal balik antar pemikir untuk menggali makna yang lebih *holistik*, di mana sejarah dipahami sebagai sintesis antara konteks masa lalu dan masa kini. Gagasan ini menjadi fondasi pemahaman Gadamer tentang sifat hermeneutika yang terbuka dan inklusif, menekankan bahwa penafsiran bukanlah aktivitas statis, melainkan proses dinamis yang berkembang seiring pergeseran zaman.⁹ Salah satu cara yang sangat penting untuk memahami adalah dengan menggunakan cakrawala teks. Saat dibuat, setiap teks memiliki sejarahnya sendiri. Karena itu, kesadaran akan mempengaruhi seorang mufassir terhadap sejarah sangat penting.

Sebagai bentuk kajian yang penulis akan bahas, penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode hermeneutika sebagai alat interpretasi. Berdasarkan latar belakang yang diberikan, penulis ingin melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan Judulnya ditetapkan oleh penulis sebagai "Tinjauan Hermeneutika Hans-goerg

⁹ Natasha Constantin. Hermeneutika, Makna dan Komunikasi dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial Filsafat dan Komunikasi* 18, no. 1, 2024.

Gadamer tentang konsep negara dalam *Membumikan Al-Qur'an dari Nama ke Pancasila* Karya Yudian Wahyudi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai fokus utama pemikiran penulis, yaitu:

1. Bagaimana perspektif Al-Qur'an membicarakan konsep negara dalam penafsiran Yudian Wahyudi?
2. Bagaimana keterpengaruh historis dan budaya mempengaruhi interpretasi konsep negara dalam penilaian Yudian Wahyudi?
3. Apa implikasi teoretis dari perspektif Yudian Wahyudi dalam penerapan konsep negara dalam konteks negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep negara melalui pendekatan Hermeneutika Gadamer dalam perspektif Yudian Wahyudi.

1. Mengkonstruksikan perspektif Al-Qur'an tentang konsep negara menurut penafsiran Yudian Wahyudi.
2. Menganalisis pengaruh historis dan budaya terhadap interpretasi Yudian Wahyudi mengenai konsep negara.
3. Mengidentifikasi implikasi teoretis dari perspektif Yudian Wahyudi dalam penerapan konsep negara di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan analisis tafsir kontemporer. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

dari penelitian ini, yaitu meningkatkan literatur akademis tentang konsep negara dalam Al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan Hermeneutika Gadamer dan juga perspektif Yudian Wahyudi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian keislaman, khususnya terkait penafsiran konsep negara melalui perspektif Yudian Wahyudi dengan menerapkan pendekatan Hermeneutika Gadamer. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat diakses oleh masyarakat luas dan dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dengan tema serupa, terlihat bahwa topik ini telah dibahas sebelumnya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dua tema utama, yaitu konsep negara dan perspektif Yudian Wahyudi.

1. Konsep Negara

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Febriana Putri dan Zainuddin dalam jurnal mereka berjudul "Konsep Negara Perspektif Al-Mawardi" bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pemikiran hukum Al-Mawardi mengenai pembentukan negara dan bentuknya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran agama memegang peran sentral dalam konsep negara menurut Al-Mawardi. Ia berpendapat bahwa agar negara tidak bersifat sekuler, agama dan negara harus saling bergantung dan melengkapi satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh hubungan timbal balik antara keduanya; agama memerlukan negara untuk melindungi dan mengembangkan ajaran-ajarannya, sementara negara membutuhkan agama sebagai landasan dalam membangun etika moral dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, agama dapat berkembang seiring dengan kemajuan negara.¹⁰

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Hanizar Meda Simbolon, Arbanur Rasyid, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dalam jurnal mereka yang berjudul “Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126” bertujuan untuk menganalisis dan menggali pemahaman tentang konsep negara ideal berdasarkan tafsiran Surah Al-Baqarah ayat 126. Islam sebagai risalah rahmat telah dikenal luas di kalangan umat, namun konsep negara ideal dalam perspektif Islam belum dielaborasi secara serius dan memadai. Akibatnya, pengetahuan ini belum berkembang menjadi wacana yang menghasilkan kriteria atau ketentuan operasional yang jelas tentang keislaman. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan umat dengan orientasi yang saling bertentangan, namun sama-sama mengklaim sebagai upaya mewujudkan Islam sebagai agama rahmat. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam tentang konsep negara ideal menurut QS. Al-Baqarah ayat 126. Menurut Al-Qur’an, sebuah negara ideal memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia

¹⁰ Eka Febriana Putri, Zainuddin, “Konsep Negara perspektif Al-Mawardi” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 3, no. 1, 2022.

yang membanggakan, mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan (khususnya dari sektor pertanian), sandang, dan papan, serta memiliki kemampuan dan dukungan untuk mengelola sarana dan prasarana. Selain itu, aspek terpenting adalah terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan.¹¹

Selanjutnya, disertasi yang ditulis oleh Muchotob Hamzah dengan judul “Konsep Negara dalam Tradisi Islam” menggunakan teori Pluralisme dalam Islam dari Esposito dan teori Negara Islam dari Ahmed an-Naim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: 1) Mengapa terdapat keragaman dalam konsep negara dalam tradisi Islam, 2) Bagaimana karakteristik konsep negara dalam Islam, dan 3) Ke mana arah perkembangan konsep negara dalam politik Islam kontemporer. Berdasarkan analisis data, temuan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, keragaman konsep negara dalam Islam disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* mencakup *nash* (teks) dan *syahsiyyah* (kepribadian), sementara faktor *ekstrinsik* meliputi *bi'ah* (lingkungan), *ijtima'iyyah* (sosial budaya), *isti'mariyyah* (kolonialisme) yang memicu peniruan Hukum Keturunan atau sebaliknya, *iqtisadiyyah* (ekonomi), dan *alamiyyah* (globalisasi). Dialektika konsep negara pada fase nalar elit hingga nalar publik makin beraneka ragam dan bermuka dua. Pada fase nalar elit, sebelum Abduh ada Ibnu Abdul Wahhab (Wahabiyah) yang radikal dan Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) yang berkonsep khilafah tanpa kekuasaan politik. Kemudian, pada fase nalar publik,

¹¹ Hanizar Meda Simbolon, “Arbanur Rasyid Muhammad Wandisyah R. Hutagalung “Negara Ideal Menurut Surah Al-Baqarah Ayat 126”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1, 2021.

pengaruh pemikiran Abduh masuk ke kalangan sunni konservatif melalui Rasyid Ridha, dan pengikut berikutnya makin radikal dan eksklusif, bahkan mengkafirkan yang lain. Pemikiran Abduh juga berperan dalam lahirnya Qasim Amin dan pengikut berikutnya cenderung lebih liberal dan inklusif. Di samping itu, pemikiran Abduh tersebut menyebabkan lahirnya para penganut Sunni moderat seperti Abdul Qadir Audah dkk. Kedua, negara neo-genuine pada era kontemporer memiliki beberapa ciri: republik konstitusional, demokrasi, nomokratis, penentuan nasib sendiri, inklusi, fleksibilitas, akomodatif dan partisipasi. Ketiga, adanya pergeseran konsep negara dalam politik Islam kontemporer dari khilafah menjadi demokrasi keagamaan seperti di Indonesia. Implikasinya, negara sekuler dan *Daulah Islamiyyah* 'Ammah terbaik pada era kontemporer akan sampai pada ruang utopia yang melampaui utopia demokrasi yang sempurna dan tidak dapat memuaskan semua orang.¹²

Sebuah karya relevan lainnya adalah artikel jurnal karya Asrori Mukhtarom dan Priyo Susilo berjudul “Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an”. Kajian ini mengungkapkan bahwa Al-Qur’an, dengan ribuan ayatnya, mengulas konsep negara secara multidimensi mulai dari definisi, tujuan, hingga bentuk idealnya. Hal ini menegaskan bahwa Al-Qur’an mengakui esensi negara sebagai entitas vital dalam tatanan kehidupan manusia. Lebih jauh, Al-Qur’an menyerukan tanggung jawab kolektif umat beriman untuk berperan aktif dalam membangun negara yang berkeadilan. Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan nilai-nilai ini secara konkret saat memimpin Madinah. Meski konteks zaman berbeda, prinsip kepemimpinannya

¹² Muchotob Hamzah “Konsep Negara dalam Tradisi Islam”. *Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

seperti keadilan, partisipasi publik, dan keseimbangan dunia-akhirat tetap relevan sebagai model ideal tata kelola negara yang berkelanjutan.¹³

Skripsi karya Yanuar Dwi Aditya berjudul “Negara Ideal dalam Alquran: Studi Komparasi Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab” mengkaji konsep negara ideal berdasarkan tafsiran QS. Saba ayat 15. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan metodologi serta penafsiran dua ulama tersebut, dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan konteks sosio-kultural yang memengaruhi pandangan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ibnu Katsir (mufasir klasik) dan Quraish Shihab (cendekiawan kontemporer Nusantara) sepakat bahwa “*baladha tayyibah*” (negeri ideal) merujuk pada masyarakat berlandaskan ketauhidan, terdapat perbedaan penekanan. Ibnu Katsir menafsirkan konsep tersebut secara teosentris, menekankan keimanan dan ketundukan kepada Allah sebagai fondasi utama. Sementara Quraish Shihab memperluas interpretasinya dengan memasukkan dimensi sosial, seperti keamanan, kemakmuran, harmoni antarwarga, dan persatuan bangsa. Penafsiran Shihab menggabungkan aspek spiritual dengan tanggung jawab sosial, mencerminkan pengaruh konteks keindonesiaan yang pluralistik. Perbedaan ini menggarisbawahi dinamika penafsiran Alquran yang dipengaruhi oleh zaman, lingkungan, dan prioritas keilmuan masing-masing mufasir.¹⁴

¹³ Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo “Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an” *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, no. 1, 2019.

¹⁴ Yanuar Dwi Aditya “Negara Ideal dalam Alquran Studi Komparasi Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab”. *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

2. Perspektif Yudian Wahyudi

Penelitian oleh Lusiana Kurnianti dan Arif Sugitanata berjudul “Fikih Moderasi Beragama Perspektif Yudian Wahyudi” mengkaji konsep moderasi beragama dalam kerangka fikih kontemporer melalui perspektif pemikiran Yudian Wahyudi, seorang akademisi dan cendekiawan Muslim Indonesia. Penulis mengeksplorasi bagaimana Wahyudi menawarkan pendekatan fikih yang adaptif dan kontekstual untuk menjawab tantangan modern, seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi sosial, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Artikel ini menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks keagamaan secara dinamis, menggabungkan nilai-nilai universal Islam (seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan) dengan kebutuhan masyarakat majemuk. Sugitanata dan Kurnianti menyoroti kontribusi Wahyudi dalam membangun paradigma fikih yang inklusif, menekankan dialog antarperadaban, serta keseimbangan antara kesetiaan pada syariat dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Melalui analisis kritis terhadap karya-karya Wahyudi, artikel ini menyimpulkan bahwa fikih moderasi bukan hanya alat teoretis, tetapi juga kerangka praktis untuk memperkuat kohesi sosial dan perdamaian global di tengah kompleksitas zaman.¹⁵

Kemudian penelitian oleh S Sadari yang berjudul “*Qur’anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi*” mengkaji integrasi metodologis antara pendekatan ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) dan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam studi Al-Qur’an

¹⁵ Arif Sugitanata dan Lusiana Kurnianti, “Fikih Moderasi Beragama Perspektif Yudian Wahyudi”. *At-Ta’awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam* 2, no. 2, 2023.

berdasarkan perspektif Yudian Wahyudi. Penulis mengeksplorasi bagaimana Wahyudi menawarkan kerangka analitis yang menggabungkan kedalaman metodologi klasik *ushul fiqh* dengan visi holistik maqashid syariah untuk mengetahui teks-teks keagamaan secara kontekstual dan relevan dengan tantangan kekinian. Sadari menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperkuat basis *epistemologis* dalam menafsirkan hukum Islam, tetapi juga menjawab kebutuhan dinamika sosial-modern, seperti isu keadilan, hak asasi manusia, dan *pluralisme*, melalui lensa tujuan universal syariat (*al-maqashid al-kulliyah*). Artikel ini menyoroti kontribusi Wahyudi dalam mendorong rekonstruksi metodologi studi Al-Qur'an yang lebih adaptif, dengan menekankan keseimbangan antara ketelitian tekstual (*al-tsabat*) dan fleksibilitas kontekstual (*al-murunah*). Melalui analisisnya, Sadari menyimpulkan bahwa sintesis *ushul fiqh* dan *maqashid syariah* merupakan terobosan penting dalam merespons kompleksitas pemikiran hukum Islam kontemporer, sekaligus memperkuat relevansi syariat dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.¹⁶

Sementara itu, penelitian oleh Arif Sugitanata, Afthon Yazid dan Siti Aminah berjudul “Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi Dan Wahbah Zuhaili” melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran dua tokoh kontemporer, Wahbah Zuhaili dan Yudian Wahyudi, dalam hal perkembangan metodologi hukum Islam. Penulis mengkaji bagaimana kedua akademisi tersebut merumuskan teori ushul fikih dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi: Wahyudi menekankan

¹⁶ S Sadari, “Qur’anic Studies: Ber-Ushul Fiqh dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode dalam Perspektif Yudian Wahyudi” *Shahih* 3, no. 1, 2018.

reinterpretasi dinamis dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan untuk menjawab tantangan modern, sementara Zuhaili memadukan tradisi klasik dengan analisis sosio-historis untuk menjaga relevansi syariat dalam masyarakat global. Artikel ini menyoroti kontribusi keduanya dalam memperkaya wacana ushul fikih, terutama dalam isu pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, dengan tetap mempertahankan integritas epistemologi Islam. Melalui pemetaan cakrawala intelektual kedua tokoh, penulis menunjukkan bahwa dialog antara metodologi "lokal-kontekstual" (Wahyudi) dan "universal-tradisional" (Zuhaili) mampu menciptakan kerangka hukum yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kompleksitas zaman. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan pentingnya sintesis pemikiran lintas budaya dan mazhab dalam memperkuat fondasi fikih kontemporer untuk mencapai maqashid syariah yang holistik.¹⁷

F. Landasan Teori

Karya Gadamer *Wahrheit und Methode* (Kebenaran dan Metode) membahas pemikirannya tentang hermeneutika filosofis yang mencakup tidak hanya teks, tetapi juga seluruh obyek ilmu sosial dan humaniora. Meski demikian, Gadamer tetap memberikan perhatian yang signifikan pada bahasa dalam teks tertentu, yang menjadi obyek utama hermeneutikanya. Terkait hal ini, Gadamer menyatakan: "*Alles Schriftliche ist in der Tat in bevorzugter Weise Gegenstand der Hermeneutik*" (Semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai obyek hermeneutika).¹⁸

¹⁷ Afthon Yazid, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah "Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi Dan Wahbah Zuhaili" *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 1, 2024.

¹⁸ Hans-Georg Gadamer, "*Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik* Tübingen": J. C. B. Mohr, 1990. hlm. 398.

Menurut Sahiron Syamsuddin, teori hermeneutika Gadamer didasarkan pada konsep kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah atau *wirkungsgeschichtliches Bewusstsein* (*historically effected consciousness*). Artinya, penafsiran selalu dilakukan dalam situasi tertentu yang membentuk horizon yang membatasi pandangan seseorang. Situasi-situasi ini mencakup tradisi, budaya, dan pengalaman hidup, yang dapat mempengaruhi pemahaman penafsir terhadap teks. Oleh karena itu, penafsir harus sadar bahwa situasi mereka saat menafsirkan teks dapat sangat mempengaruhi pemahaman mereka. Gadamer menekankan pentingnya menyadari bahwa baik secara sadar maupun tidak, pengaruh dari *wirkungsgeschichte* (sejarah yang mempengaruhi seseorang) sangat penting dalam setiap pemahaman. Gadamer mengakui bahwa mengatasi pengaruh ini bukanlah tugas yang mudah, dan seorang penafsir harus mampu mengatasi perasaan pribadi saat menafsirkan teks..¹⁹

Selanjutnya Teori "Prapemahaman" atau *Vorverstandnis* yang dikemukakan oleh Gadamer menyatakan bahwa ketika seorang penafsir dipengaruhi oleh situasi hermeneuti tertentu atau *wirkungsgeschichte*, mereka mengembangkan prapemahaman terhadap teks yang ditafsirkan. Posisi awal penafsir ini harus ada saat membaca teks. Menurut Gadamer, prapemahaman selalu berperan dalam proses pemahaman; prapemahaman ini dibentuk oleh tradisi yang berpengaruh di tempat seorang penafsir berada, serta asumsi awal yang terbentuk dalam tradisi tersebut. Teori ini berpendapat bahwa prapemahaman harus ada agar penafsir dapat berdialog dengan

¹⁹ Sahiron Syamsudin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*" Yogyakarta: Nawasca Press, 2017, hlm 79.

teks yang ditafsirkan. Seseorang tidak dapat memahami teks dengan baik tanpa pemahaman sebelumnya. Gadamer juga berpendapat bahwa penafsir dapat mengkritik, merehabilitasi, dan mengoreksi prapemahaman mereka ketika menyadari bahwa prapemahaman tersebut tidak sesuai dengan maksud teks yang ditafsirkan.²⁰

Adapun Teori Penggabungan Horizon (*Horizontverschmelzung: fusion of horizons*) menyatakan bahwa seseorang harus terus memperbaiki pemahaman sebelumnya tentang teks saat menafsirkannya. Hal ini berkaitan dengan teori penggabungan dan cakrawala asimilasi, yang berarti terdapat dua cakrawala: "cakrawala pengetahuan" yang ada di dalam teks dan "cakrawala pemahaman" yang ada di luar teks.²¹

Teori terakhir yaitu "Penerapan/Aplikasi." Dalam proses pemahaman dan penafsiran teks, makna obyektif harus diprioritaskan. Setelah memahami makna obyektif, penafsir harus menerapkan pesan yang terkandung dalam teks dalam kehidupan sehari-hari, seperti kitab suci. Rentang waktu antara saat teks muncul dan saat penafsir hidup, yang meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, sangat berbeda dengan keadaan saat teks muncul. Menurut Gadamer, selain proses memahami dan menafsirkan, ada hal lain yang diperlukan saat membaca kitab suci, yaitu penerapan (*Awendung*) pesan atau ajaran saat teks ditafsirkan. Penerapan ini mengacu pada pesan yang harus disampaikan bukan hanya sebagai makna literal teks, tetapi juga sebagai makna yang lebih luas dan relevan dengan konteks penafsir.²²

²⁰ Sahiron Syamsudin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", hlm 80.

²¹ Sahiron Syamsudin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", hlm 81.

²² Sahiron Syamsudin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", hlm 83-

G. Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis data-data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan Hermeneutika Gadamer untuk menjawab masalah penelitian. Hermeneutika Gadamer dipilih karena konsep *fusion of horizons*-nya memadukan makna teks Al-Qur'an (tradisi) dengan konteks kekinian, memungkinkan konsep negara dalam Islam ditafsirkan secara dinamis. Pendekatan ini menghindari pemahaman literal dan mengakui peran konteks historis-sosial serta subjektivitas penafsir, sehingga relevan untuk "membumikan" Al-Qur'an dalam realitas politik modern, sesuai perspektif Yudian Wahyudi.

Mengingat penelitian skripsi ini berbentuk penelitian kualitatif dengan sumber data kepustakaan, untuk mencapai hasil yang optimal, sumber data diklasifikasikan berdasarkan kedudukan data tersebut, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penafsiran Yudian Wahyudi, sedangkan sumber data sekunder yang mendukung penelitian mencakup buku, artikel, dan jurnal.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berbasis kajian dokumen. Proses ini dilakukan melalui eksplorasi mendalam terhadap literatur, meliputi pemahaman konseptual dan analisis kritis terhadap karya-karya Yudian Wahyudi serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Untuk analisis data, penulis menerapkan metode kualitatif dengan tahapan sistematis: pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi esensial, verifikasi kebenaran data melalui *cross-check*, dan akhirnya penyimpulan temuan secara deduktif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan tetap berfokus pada jalur yang telah ditentukan sesuai dengan rumusan masalah, peneliti telah menetapkan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab dirancang untuk membahas aspek-aspek tertentu yang saling berkaitan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan mudah dipahami. Sistematika ini memastikan bahwa setiap tahap penelitian, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan, diuraikan dengan jelas dan logis, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Bab pertama membahas latar belakang penelitian yang menguraikan urgensi mengkaji konsep negara dalam Al-Qur'an melalui perspektif Yudian Wahyudi, terutama dalam konteks tantangan ideologi seperti gerakan khilafah HTI yang bertentangan dengan Pancasila. Rumusan masalah difokuskan pada tiga aspek: perspektif Al-Qur'an tentang negara menurut Yudian Wahyudi, pengaruh historis-budaya dalam interpretasinya, serta implikasi teoretis bagi Indonesia. Tujuan penelitian dirancang untuk mengonstruksi pemahaman dinamis konsep negara dengan pendekatan hermeneutika Gadamer, sementara kegunaan penelitian mencakup pengayaan literatur tafsir kontemporer dan relevansi praktis dalam memperkuat ideologi Pancasila. Penelitian terdahulu dipetakan untuk menunjukkan posisi orisinalitas studi ini, terutama dalam integrasi hermeneutika Gadamer dengan pemikiran Yudian Wahyudi. Landasan teori merujuk pada konsep *fusion of horizons*, *historicity*, pra-pemahaman, dan aplikasi Gadamer sebagai alat analisis, sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan. Sistematika pembahasan disusun secara terstruktur untuk memandu analisis dari tinjauan umum hingga implikasi kontekstual.

Bab Kedua akan membahas tinjauan umum tentang konsep negara, mencakup definisi, unsur-unsur pembentuk seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan internasional, serta fungsi dan perannya dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan. Kemudian, konsep negara dikaitkan dengan upaya membumikan Al-Qur'an, menghubungkan prinsip kenegaraan modern dengan nilai-nilai Islam.

Bab Ketiga membahas biografi Yudian Wahyudi. Bagian pertama menguraikan riwayat hidup Yudian Wahyudi, mulai dari latar belakang keluarganya, perjalanan hidup, hingga pengalaman yang membentuk pemikirannya. Selanjutnya, dijelaskan riwayat pendidikannya, baik formal maupun nonformal, yang menjadi fondasi keilmuannya, termasuk institusi-institusi tempat ia menimba ilmu dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektualnya. Selain itu, dipaparkan pula karya-karyanya yang mencakup buku, artikel, dan pemikiran-pemikiran yang telah ia kontribusikan dalam bidang keislaman dan filsafat.

Bab Keempat membahas hasil dan pembahasan yang terstruktur berdasarkan rumusan masalah. Pertama, Pandangan Al-Qur'an tentang konsep negara dalam penafsiran Yudian Wahyudi diuraikan dengan menganalisis ayat Al-Qur'an yang relevan dan prinsip-prinsip dasar kenegaraan Islam yang diintegrasikan dengan konsep negara modern. Kedua, keterpengaruhan historis dan budaya dalam interpretasi konsep negara dikaji, meliputi pengaruh sejarah perkembangan pemikiran politik Islam dan konteks sejarah Indonesia,

serta nilai-nilai budaya lokal yang membentuk perspektif Yudian Wahyudi. Ketiga, implikasi teoretis dan praktis pemikiran Yudian Wahyudi dalam konteks negara Indonesia dibahas, mencakup relevansi prinsip keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan dalam Al-Qur'an dengan realitas Indonesia, serta kontribusi pemikirannya dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif. Terakhir, dilakukan refleksi kritis terhadap pemikiran Yudian Wahyudi, mengevaluasi kelebihan, keunikan, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks keindonesiaan yang plural, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dan konsep negara modern yang relevan bagi Indonesia.

Bab Kelima berperan sebagai bagian penutup yang merangkum temuan utama penelitian sekaligus memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada bab ini, peneliti juga mengemukakan saran aplikatif dan rekomendasi strategis guna memastikan implementasi holistik dari hasil kajian yang telah dilakukan.